

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN PERAN AUDIT INTERNAL  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi stara I  
pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

**ANNISA FITRIA RAHMA CANTIKA**

**B200140084**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN PERAN AUDIT INTERNAL  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
(BPPKAD) Kabupaten Grobogan)**

**PUBLIKASIH ILMIAH**

Oleh:

**ANNISA FITRIA RAHMA CANTIKA**  
**B200140084**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Atwal', written over a large, loopy circular flourish.

**Drs. Atwal Arifin, M.Si., Akt., CA**  
**NIDN: 0609016002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**"PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN PERAN AUDIT INTERNAL  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH"**

**(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)**

Yang ditulis oleh:

**ANNISA FITRIA RAHMA CANTIKA**

**B200140084**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 31 Januari 2018

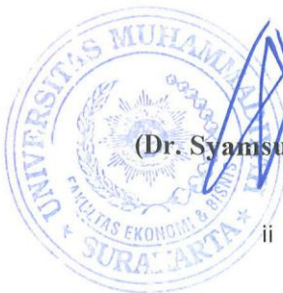
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Atwal Arifin, M.Si., Akt., CA  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Zulfikar, SE., M.Si.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andy Dwi Bayu Bawono, SE., M.Si., Ph.D.  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**(Dr. Syamsudin, MM)**

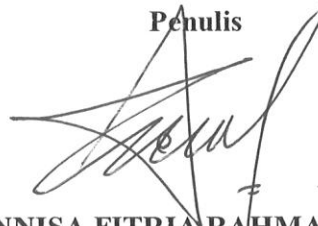
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



ANNISA FITRIA RAHMA CANTIKA

B200140084

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN PERAN AUDIT INTERNAL  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPPKAD Kabupaten Grobogan. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling dan memperoleh 64 responden. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fasilitas program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan untuk kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern dan peran audit internal tidak berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Peran Audit Internal dan Kualitas Laporan Keuangan.

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to examine the influence of human resources competences, the utilization of technological information, the implementation of internal control systems and the role of internal audit toward the quality of the financial statement of local government in Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) of Grobogan regency. The research uses quantitative method, using primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. The population in this research were employee in BPPKAD Grobogan. Sampling through purposive sampling and obtained of 64 respondents. The tools of analysis used was multiple regression with SPSS program version 21. The result of the study can be concluded that the utilization of technological information have a significant effect on the quality of the local government financial statement, while the competence of human resources, the

implementation of the internal control system and the role of internal audit does not an affect on the quality of the local government financial statement.

**Keyword:** Competence Of Human Resources, The Utilization Of Technological Information, The Implementation Of Internal Control Systems, The Role Of Internal Audit And Quality Financial Statement.

## **1. PENDAHULUAN**

Bergesernya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan berlakunya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah diberikan wewenang yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut, tentu ada kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang diambil tersebut dapat berkaitan dengan keputusan sosial, ekonomi maupun politik. Informasi dalam laporan keuangan tidak boleh berisikan informasi yang menyesatkan, karena dapat berakibat terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan harus diperhatikan untuk menghindari adanya kesalahan informasi dalam laporan keuangan (Mahmudi, 2016). Laporan keuangan dikatakan berkualitas adalah jika laporan keuangan tersebut telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif

laporan keuangan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Setyowati et al., (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugasnya sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dari bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Sumber daya manusia yang berkompeten lebih mudah memahami akuntansi dengan baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Faktor yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi kepada pelayanan publik. Faktor yang ketiga adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengenalan intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Setiap bagian akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan tanggungjawabnya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan. Faktor keempat adalah peran internal audit. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keterandalan informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan reviu. Untuk dapat memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sesuai SAP untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah dengan mengambil judul PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan).

## **2. METODE**

Desain Penelitian : Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena data yang digunakan adalah dalam bentuk angka yang bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPPKAD Kabupaten Grobogan. Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari BPPKAD Kabupaten Grobogan.

Populasi dan Sampel Penelitian : Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teknik purposive sampling*. Adapun kriteria penentuan sampel pada penelitian ini meliputi: Pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai yang bersedia menjadi responden dan pegawai yang mengisi data kusioner secara lengkap.

Data dan Sumber Data : Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari pengisian kusioner. Kusioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015: 142). Penyebaran kusioner ini adalah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di BPPKAD Kabupaten Grobogan.

Analisis Regresi Linier Berganda Untuk analisis regresi linier berganda, model regresi:



$$KLKPD = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 PTI + \beta_3 PSPIP + \beta_4 PAI + \varepsilon$$

Keterangan :

KLKPD : Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien regresi KSDM

$\beta_2$  : Koefisien regresi PTI

$\beta_3$  : Koefisien regresi SPIP

$\beta_4$  : Koefisien regresi PAI

KSDM : Kompetensi sumber daya manusia

PTI : Pemanfaatan teknologi informasi

PSPIP : Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah

PAI : Peran audit internal

$\varepsilon$  : Error

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Instrumen ini pengukuran variabel menggunakan skala likert.

Variabel Independen

Kompetensi Sumber Daya Manusia : Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Andini dan Yusrawati, 2015). Instrumen ini pengukuran variabel menggunakan skala likert.

Pemanfaatan Teknologi Informasi : Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan (Desimiyati, 2014). Instrument ini pengukuran variabel menggunakan skala likert.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern : Penerapan sistem pengendalian intern adalah proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Instrument ini pengukuran variabel menggunakan skala likert.

Peran Audit Internal : Peran audit internal merupakan suatu aktivitas yang independen, keyakinan obyektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas (Setyowati et al, 2016). Instrument ini pengukuran variabel menggunakan skala likert.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Uji Instrumen Data**

Uji Validitas : Uji validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner yang disebarkan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika hasil pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang signifikan diukur oleh kuesioner tersebut. uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan variabel dependen maupun independen adalah valid karena nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka alat tes yang digunakan valid. Tingkat

signifikansinya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Dimana r tabel untuk N=64 adalah 0,246.

Uji reliabilitas : Setelah dilakukan pengujian pada validitas, maka dapat dilakukan pengujian reliabilitas. Hasil uji reliabilitas semua variabel baik variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran audit internal secara berurutan adalah 0,805; 0,788; 0,768; 0,715 dan 0,817 adalah reliabel karena mempunyai nilai *alpha cronbach* > 0,6, sehingga dapat digunakan untuk mengolah data selanjutnya.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas : Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk masing-masing variabel dengan menggunakan *one-sampel* Kolmogorov-Smirnov *Test* yang dilakukan oleh *software* SPSS. Hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* terhadap *Undstandardized residual* adalah 0,928, dapat diketahui bahwa *p-value* untuk data ternyata lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  ( $p > 0,05$ ), sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data yang diperoleh memiliki sebaran yang normal.

Uji Multikolinieritas : Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Dari Hasil pengujian dapat diketahui bahwa seluruh variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern dan peran audit internal memiliki nilai *VIF* secara berurutan adalah 2,301; 1,860; 2,495 dan 1,695 yaitu memiliki *VIF* < 10 dan nilai *tolerance* secara berurutan adalah 0,435; 0,538; 0,401 dan 0,590 yaitu nilai *tolerance* > 0,1, sehingga tidak terjadi Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas : Uji heteroskedastisitas adalah penyebaran titik data populasi pada bidang regresi tidak konstan yang bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan Uji Glejser. Hasil pengujian heteroskedastisitas untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern dan peran audit internal secara berurutan adalah 0,320; 0,186; 0,840 dan 0,088 menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai  $p > 0,05$  atau tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Uji F : Uji F digunakan untuk menguji apabila semua variabel digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah didapatkan bahwa nilai F hitung 11,411 dengan  $p\text{-value} = 0,000$ , sedangkan F tabel 2,53 dengan ketentuan  $\alpha = 5\%$ ,  $df = k-1$  atau  $5 - 1 = 4$ , dan  $df_2 = n-k$  atau  $64-5 = 59$ , hasil uji dari distribusi F hitung 11,411 lebih besar dari F tabel 2,53 dengan  $p\text{-value} 0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran audit internal secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah atau model sudah *fit of goodness*.

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t	Sig	Keterangan
(Constant)	13,969			
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,182	1,185	0,241	H1 ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,515	3,634	0,001	H2 diterima
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,074	0,288	0,774	H3 ditolak
Peran Audit Internal	0,052	0,316	0,753	H4 ditolak

Sumber: Data primer diolah penulis, 2017

Hasil analisis regresi linier berganda secara sistematis persamaannya adalah sebagai berikut:

$$KLKPD = 13,969 + 0,182 \text{ KSDM} + 0,515 \text{ PTI} + 0,074 \text{ PSPIP} + 0,052 \text{ PAI} + e$$

Interprestasi dari masing-masing koefisien variabel adalah sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 13,969 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran audit internal, diasumsikan konstan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat, Koefisien regresi pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,182 menunjukkan bahwa jika kompetensi sumber daya manusia itu semakin meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat, Koefisien regresi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,515 menunjukkan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi itu semakin meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat, Koefisien regresi pada variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,074 menunjukkan bahwa jika penerapan sistem pengendalian intern pemerintah itu semakin meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat, Koefisien regresi pada variabel peran audit internal sebesar 0,052 menunjukkan bahwa jika peran audit internal itu semakin meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat.

Uji t : Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut:

Dari perhitungan t hitung dari variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 1,185 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,001 dan nilai sig sebesar 0,241 lebih besar dari 5%, sehingga H1 ditolak, artinya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti tidak semua pegawai memiliki pendidikan yang tinggi dan tidak semua sesuai bidangnya, sehingga pegawai tidak dapat dengan cepat memahami apa yang harus dikerjakan. Rendahnya tingkat pemahaman pegawai terhadap tugas mengenai administrasi keuangan dan fungsinya serta hambatan didalam pengelolaan data juga dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian tugas yang harus diselesaikan, salah satunya dalam penyajian laporan keuangan.

Dari perhitungan t hitung dari variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 3,634 lebih besar dari t tabel sebesar 2,001 dan nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari 5%, sehingga H2 diterima, artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dijelaskan bahwa, berarti semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada BPPKAD Kabupaten Grobogan maka semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian dapat terlihat dari jumlah komputer yang memadai, terpasangnya jaringan internet yang memudahkan pegawai dalam akses dan transfer data, kemudian proses penyusunan laporan keuangan di setiap SKPD sudah dibantu dengan suatu aplikasi akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik tersebut menjadikan pegawai semakin cepat dalam menyusun laporan keuangan dan berdampak pada ketepatan waktu laporan keuangan pada BPPKAD.

Dari perhitungan t hitung dari variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,288 lebih kecil dari t tabel 2,001 dan nilai sig sebesar 0,774 lebih besar dari 5%, sehingga H3 ditolak, artinya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti penerapan sistem pengendalian intern yang ada pada BPPKAD Kabupaten Grobogan tidak berjalan dengan baik. Tujuan sistem pengendalian intern salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi. Adanya sistem pengendalian intern yang baik maka risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisir sehingga mengurangi kemungkinan untuk mengalami kekeliruan dan kesalahan. Apabila sistem pengendalian intern dalam pemerintah daerah berjalan tidak baik maka semua operasi, sumber daya dan data tidak akan terkendali, tujuan tidak tercapai dan tidak dapat meminimalisir kesalahan sehingga pemerintah daerah pada BPPKAD Kabupaten Grobogan tidak dapat menghasilkan informasi akuntansi yang baik.

Dari perhitungan t hitung dari variabel peran audit internal sebesar 0,316 lebih kecil dari t tabel 2,001 dan nilai sig 0,753 lebih besar dari 5%, sehingga H4 ditolak, artinya peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. hal ini dikarenakan inspektorat selaku audit internal pemerintahan daerah tidak terlalu berperan aktif dalam melakukan revidi laporan keuangan dalam memeriksa keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Peran inspektorat lebih ditekankan sebagai pengawas dalam pemerintahan seperti dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyatakan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten. Sedangkan dalam urusan pemeriksaan laporan keuangan untuk menentukan keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah lebih ditekankan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga peran inspektorat selaku audit internal disini tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan.

Uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi) : Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,398, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan peran audit internal) menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPPKAD Kabupaten Grobogan sebesar 39,8% dan sisanya 60,2% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

H1 ditolak, ini berarti variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2 diterima, ini berarti variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H3 ditolak, ini berarti variabel penerapan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H4 ditolak, ini berarti variabel peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini antara lain:

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga penulis tidak mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban tersebut. Kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu masing-masing responden, Faktor pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbatas pada kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern dan peran audit internal, sehingga cakupannya kurang luas untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia, Obyek penelitian hanya terbatas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan sehingga hasil akhir tidak dapat digeneralisir.

#### 4.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan penulis diatas, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut:

Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan metode *survey* dengan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya.

Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini.

Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah obyek penelitian lain yang lebih luas untuk memperkuat hasil penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustiawan, Nyoman Triyadi dan Ni Ketut Rasmini. 2016. Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 5 (10). ISSN : 2337-3067.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas



- Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 1. Vol.24, No.01, Juni 2015.
- Desmiyati. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Study Empiris pada SKPD Pemda Riau). *Jurnal Akuntansi STIE Semarang*, Vol. 05, No. 02, April 2014 : 163-178 ISSN 2337-4314
- Firdaus., Nadirsyah., dan Heru Fahlevi. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Kebijakan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. Vol. 4, No. 1, Februari 2015. pp. 45-54. ISSN : 23020164.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kiranayanti, Ida Ayu Eny dan Ni Made Ade Erawati. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16, No. 02, Agustus 2016. ISSN:2302-8556.
- Lasmara, Freddie dan Sri Rahayu. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol.03, No.04. ISSN : 2338-4603.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Setyowati, Lilis., Wikan Istrika., dan R. D. Pratiwi. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *KINERJA*. Vol.20, No.02. pp. 179-191.
- Sudiarianti, N. M., I. G. K. A. Ulupui., dan I. G. A. Budiasih. 2015. Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sietem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Simposium Nasional 18. Universitas Sumatera Utara, Medan. 16-19 September 2015.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir, Toni. 2014. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Budaya Organisasi Daerah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bukittinggi). *E-journal Universitas Negeri Padang*.
- Yeny., Herman Karamoy., dan Agus T. Paputra. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal EMBA*. Vol. 4, No. 3, September 2016. ISSN : 2303-1174.
- Yuliani, Safidra., Nadirsyah., dan Usman Bakar. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal telaah dan riset akuntansi*. Vol.03, No.02. pp. 206-220.